

KONVERGENSI STANDAR AKUNTANSI DAN UNDANG- UNDANG PERPAJAKAN

Akuntansi Perpajakan

Bab 1

Tujuan Pembelajaran



Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perkembangan standar akuntansi Indonesia dan negara lainnya



Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan standar akuntan keuangan (PSAK) dan implementasinya



Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dan implementasinya



mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perbedaan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan

Pendahuluan

- Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global tidak dapat menutup diri dari perkembangan yang terjadi di dunia Internasional. Pihak dewan standar akuntansi keuangan (DSAK) telah menetapkan bahwa tahun 2012 Indonesia mengadopsi total semua IFRS yang ada pada 1 januari 2009.
- Beberapa kendala dalam penerapan IFRS yang digunakan sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu :
 - Sistem hukum dan fiskal
 - Sistem perpajakan dan fiskal
 - Ekonomi dan aktivitas bisnis
 - Sistem pasar modal dan peraturan
 - Budaya korporasi
 - teknologi

Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

- Di Indonesia perkembangan standar akuntansinya diawali dengan lahirnya prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).
- Inisiatif Komite prinsip akuntansi Indonesia (KPAI) untuk mengembangkan standar akuntansi keuangan Indonesia dengan berlandaskan pokok *International Accounting Standards* (IAS), sehingga mengubah PAI menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengadopsi penuh Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dari IASC (*International Accounting Standard Committee*).

Konvergensi IFRS

- Dengan konvergensi IFRS, laporan keuangan menjadi lebih transparan, relevan, dapat diandalkan, dapat dimengerti, dan diterima di era globalisasi yang mampu menunjang pembangunan ekonomi Indonesia, seiring dengan perkembangan pasar modal dengan tetap memperhatikan keadaan, kebutuhan dan kendala yang timbul.
- Di Indonesia standar akuntansi dikenal :
 - Pernyataan standar akuntansi keuangan lengkap (PSAK)
 - Pernyataan standar akuntansi keuangan ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)
 - Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

- Dengan terbukanya Indonesia sebagai tempat investasi asing memungkinkan terbentuknya pasar modal di Indonesia. Sebagai konsekuensinya di bidang akuntansi perlu menciptakan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- PAI yang berlaku di Indonesia pada tahun 1973. Tahun 1984 pihak komite PAI melakukan revisi mendasar terhadap PAI 1973 agar ketentuan akuntansi mengikuti perkembangan dunia usaha. Tahun 1994 dilakukan revisi kembali dan mengodifikasikan dalam standar akuntansi keuangan serta pihak IAI melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional. Tahun 2012 Indonesia mengadopsi seluruh IFRS sesuai yang ditetapkan dewan standar akuntansi keuangan (DSAK)

Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK

- Pengertian laporan keuangan sesuai PSAK No. 1 (Revisi 2009) paragraf 9 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.
- Tujuan laporan keuangan, memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.
- Laporan keuangan menyajikan informasi keuangan meliputi :
 - Aset
 - Liabilitas
 - Ekuitas
 - Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
 - Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai penulis
 - Arus kas

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)

- Pembentukan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) sebenarnya bertujuan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu entitas yang :
 - Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
 - Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Sebagai contoh pengguna eksternal yaitu pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit

Laporan Keuangan Berdasar SAK ETAP

- Isi laporan keuangan entitas yang lengkap sesuai SAK ETAP meliputi :
 1. Neraca
 2. Laporan laba rugi
 3. Laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba
 4. Laporan arus kas
 5. Catatan atas laporan keuangan

Pajak Penghasilan

- Dalam pajak penghasilan entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Apabila terjadi jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

Transaksi Dalam Mata Uang Asing

- Transaksi mata uang asing ini yaitu transaksi yang didominasi atau harus diselesaikan dalam mata uang asing yang meliputi transaksi yang timbul ketika entitas :
 1. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam mata uang asing
 2. Meminjam atau meminjamkan dana atas sejumlah utang atau piutang yang didenominasi dalam mata uang asing
 3. Memperoleh atau melepas aset, atau terjadinya atau menyelesaikan kewajiban yang didenominasi dalam mata uang asing

Mata Uang Pencatatan dan Pelaporan dalam SAK ETAP

- Semua entitas yang akan menggunakan atau telah menggunakan mata uang selain rupiah sebagai mata uang pelaporan diatur :
 - Mata uang pencatatan yaitu mata uang yang digunakan oleh entitas untuk membukukan transaksi terhadap mata uang pencatatan haruslah sama dengan mata uang pelaporan
 - Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan
 - Mata uang fungsional yaitu mata uang utama dalam arti substansi ekonominya, sebagai mata uang dicerminkan dalam kegiatan operasi entitas
 - Laporan keuangan pada umumnya dilaporkan dalam uang lokal, tetapi bila entitas menggunakan mata uang selain mata uang lokal seperti dolar amerika, maka mata uang pelaporan harus melakukan mata uang fungsional.
 - Indikator harga jual
 - Indikator biaya

Undang-undang Perpajakan

- Sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam standar akuntansi, undang-undang perpajakan mengalami reformasi. Perubahan tersebut antara lain dengan telah diundangkannya undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No.36 tahun 2008 yang berlaku efektif tanggal 1 januari 2009.